



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke	: 9
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Kepala BNPB
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 2 Juni 2021.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2022 dan RKP Tahun 2022 (RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2022); 2. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022; 3. Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021.
Ketua Rapat	: H. Yandri Susanto, S.Pt
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 38 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 9 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Kepala BNPB Beserta Jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Bpk H. Yandri Susanto, S.Pt, dengan didampingi Wakil Ketua Hj.Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si., Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si, dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang sesuai dengan waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan agenda membahas **“Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2022 dan RKP Tahun 2022, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2020 dan Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021”** disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat menerima Pagu Indikatif BNPB Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.127.245.197.000,- (*Satu Triliun Seratus Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) yang terdiri dari:
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp289.010.347.000,- (*Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Sepuluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
 - b. Program Ketahanan Bencana sebesar Rp838.234.850.000,- (*Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pembicaraan lebih lanjut mengenai Pagu Indikatif BNPB Tahun Anggaran 2022 akan dibahas dengan Eselon I BNPB tanggal 7 Juni 2021.

2. Komisi VIII DPR RI meminta BNPB untuk menyampaikan laporan penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) Tahun 2020 secara rinci dan transparan mengenai alokasi dana yang digunakan untuk program apa saja serta disalurkan ke mana saja.
3. Komisi VIII DPR RI mendorong BNPB untuk meningkatkan realisasi anggaran Tahun 2021 yang baru terserap Rp977.966.863.499,- (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*) atau 28,54 persen dari Pagu Anggaran BNPB Tahun 2021 sebesar Rp3.427.028.467.000,- (*Tiga Triliun Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
4. Komisi VIII DPR RI meminta Kepala BNPB untuk sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Mendorong BNPB untuk memperhatikan daerah-daerah yang masuk zona merah atau memiliki angka penyebaran Covid-19 yang tinggi seperti Kudus, Pati, Riau dan lain-lain.

- b. Meminta BNPB untuk memperhatikan penanggulangan bencana di Daerah Pemilihan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagaimana amanat Undang-undang bahwa Anggota DPR RI wajib memperhatikan daerah pemilihannya.
- c. Memastikan agar setiap bantuan yang disalurkan oleh BNPB ke daerah-daerah rawan bencana untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang jelas.
- d. Mempercepat pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.40 WIB.

KETUA KOMISI VIII DPR RI,



H. YANDRI SUSANTO, S.Pt